

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Terasa begitu menarik berbicara seputar masalah perempuan apalagi ketika mendengar bertambah satu lagi perempuan menjadi pemimpin sebuah Negara. Rasanya seperti sebuah mimpi bahwa kaum perempuan di berbagai belahan dunia saat ini mulai bangkit dan sukses diberbagai bidang kehidupan, bahkan mampu mencapai posisi tertinggi dalam sebuah Negara baik itu Perdana Menteri maupun Presiden. Dapat kita lihat keberhasilan Sirimavo Bandaranaike menjadi perdana menteri perempuan pertama Srilanka, Indira Gandhi menjadi perdana menteri India pada tahun 1966-1977, Golda Meier perdana menteri Israel 1969-1974, Isabel Peron menjadi presiden Argentina tahun 1974-1976, Margareth Tacher menjadi perdana menteri Inggris tahun 1979, Corazon Aquino dan Gloria Macapagal Aroyo menjadi presiden Filipina, Benazir Butho di Pakistan, Begum Khaleda Zia di Bangladesh dan termasuk juga Megawati Soekarno Putri yang menjabat sebagai presiden perempuan pertama bagi Indonesia. Ketertarikan inilah yang membuat penulis terdorong untuk membahas tentang kepemimpinan perempuan dalam politik sesuai dengan bidang

Pada tahun 2007 India adalah salah satu Negara yang menggelar pesta demokrasi yaitu pemilihan umum presiden. Dan salah satu kandidatnya adalah seorang perempuan bernama Pratibha Patil yang berasal dari Partai Kongres. Yang membuat menarik adalah *pertama*, Pratibha Patil berhasil keluar sebagai pemenang dan resmi diangkat sebagai presiden India pada tanggal 21 Juli 2007 setelah berhasil mengalahkan lawannya yaitu Wakil Presiden India Bhairon Singh Shekhawat (84) yang dicalonkan Partai Bharatiya Janata, partai oposisi Hindu nasionalis. Ini menambah satu lagi deretan perempuan yang berhasil menjadi pemimpin Negara. *Kedua*, Pratibha Patil tercatat sebagai presiden perempuan pertama India sejak 60 tahun kemerdekaannya. *Ketiga*, jabatan presiden India hanyalah jabatan seremonial saja namun Patil dianggap sebagai simbol kemenangan bagi ratusan juta perempuan India yang sering kali mengalami tindak diskriminasi.

Kemenangan Pratibha Patil dalam pemilihan presiden India menghangatkan lagi gairah pembicaraan mengenai perempuan yang menjadi pemimpin. Pratibha Patil menambah lagi daftar para pemimpin perempuan. Meski tampilnya perempuan dalam panggung kekuasaan dan kepemimpinan bukan hal yang baru lagi, tetap saja peristiwa ini menarik untuk dicermati dan diperbincangkan, sebab mayoritas pemimpin negara di dunia masih dipegang oleh laki-laki. Maka tampilnya Pratibha Patil menggerakkan lagi pembicaraan dan imajinasi mengenai era kepemimpinan

Alasan - alasan inilah yang membuat penulis akhirnya memutuskan untuk mengambil tema kepemimpinan perempuan di India yang juga merupakan isu yang masih hangat untuk diperbincangkan. Untuk itu penulis mengambil judul **“kemenangan Pratibha Patil sebagai presiden perempuan pertama pada pemilihan umum India tahun 2007”**

B. Tujuan

Dalam tulisan ini, mempunyai tujuan untuk memberikan penjelasan tentang

1. Mengetahui faktor-faktor yang mendukung kemenangan Pratibha Patil menjadi presiden perempuan pertama di India
2. Memenuhi syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

C. Latar Belakang Masalah

Pratibha Patil telah berhasil memenangkan pemilihan presiden India ke-13 yang digelar pada tanggal 19 Juli 2007. Pemilihan presiden ini diikuti oleh dua orang kandidat yaitu Pratibha Patil dari Partai Kongres dan Bhairon Singh Shekhawat dari BJP. Pratibha mendapatkan dukungan penuh dari United Progressive Alliance (UPA) dan Left Front, sementara Bhairon mengajukan diri sebagai calon independen yang didukung oleh National Democratic Alliance (NDA). Pratibha menang dengan

suara. Hasil ini diumumkan oleh Komisi Pemilihan India pada tanggal 21 Juli 2007 bahwa Pratibha telah memenangkan Pilpres dan berhak atas kursi presiden yang resmi diberikan pada tanggal 24 Juli 2007. Dan Pratibha Patil menjadi presiden perempuan pertama India sejak 60 tahun kemerdekaannya..

India merupakan Negara yang terletak di kawasan Asia Selatan. Merdeka pada tanggal 15 Agustus 1947 setelah lepas dari cengkraman Inggris. India menganut sistem demokrasi yang memberikan kebebasan berpolitik bagi warga negaranya termasuk partisipasi perempuan dalam politik. Walaupun India merupakan Negara demokrasi paling lama di Asia Selatan akan tetapi keberadaan perempuan di dunia politik masih merupakan fenomena baru.

Jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lain yang maju pesat, jelas bahwa perempuan India masih mendapat perlakuan yang relatif buruk. Perempuan dianggap sebagai beban oleh kalangan masyarakat miskin karena sistem mahar, yang sudah dilarang secara hukum namun masih banyak diterapkan. Pada saat penjajahan Inggris lah sistem mahar telah diselewengkan bentuknya. dari sebuah jaring pengaman ekonomi menjadi jebakan mematikan. Aspek sukarela dari mahar, maknanya sebagai suatu bentuk cinta kepada anak perempuan, perlahan tapi pasti memudar dan berubah bentuk menjadi pembayaran wajib yang mengikuti ikatan

Catatan yang dihimpun dari statistik pengaduan kepada National Commission for Women, India (NCW), tahun 1999-2004, memperlihatkan bahwa selama lima tahun terakhir, kekerasan dan kematian perempuan yang berkaitan dengan mahar menduduki peringkat kedua tertinggi setelah kasus pelecehan. Apabila dihitung rata-rata berdasarkan data tersebut, terjadi 873 kasus mahar setiap tahun, atau lebih dari dua kasus kekerasan karena mahar terjadi setiap hari di India.¹

Gambaran ini pun masih harus diberi catatan mengingat masih banyak perempuan atau keluarga korban yang takut melaporkan karena berbagai tekanan yang mereka terima atau karena tidak tahu harus melapor kepada siapa.

Mahar adalah sejenis pembayaran dalam bentuk uang ataupun barang oleh keluarga pengantin perempuan kepada keluarga pengantin laki-laki bersamaan dengan penyerahan pengantin perempuan kepada keluarga pengantin laki-laki dalam tradisi pernikahan India

Mahar merupakan simbol seorang perempuan yang diterima secara penuh sebagai anggota keluarga suaminya dan memasuki kehidupan perkawinan dengan harta bendanya sendiri. Namun, dalam perkembangannya, tradisi ini berubah bentuk saat di bawah tekanan ekonomi penjajahan Inggris.

¹BI Purwantari, "Sisi Gelap India Modern" (diakses 12 November 2007) dari <http://www.kompas.com/kompas-cetak>

Dengan beban pajak tanah yang cukup berat, keluarga-keluarga petani di India mengharapkan adanya uang untuk biaya hidup sehari-hari mereka. Akibatnya, mahar secara berangsur-angsur dilihat sebagai sumber pemasukan penting bagi keluarga. Pada momen itu, mahar telah diselewengkan bentuknya.

Sebuah gambaran akurat jumlah korban agak sulit diperoleh mengingat angka statistik yang ada sangat beragam dan kadang-kadang saling bertentangan. Pada tahun 1995, National Crime Bureau of The Government of India melaporkan 6.000 perempuan mati berkaitan dengan mahar setiap tahun. Sebuah artikel yang ditulis Himendra Thakur berjudul *Are our Sisters and Daughter for Sale?* menyebutkan angka kematian perempuan karena mahar mencapai 25.000 kasus setahun, dengan catatan banyak kasus lain yang kemungkinan tidak dilaporkan karena adanya ancaman.²

Kasus kekerasan terhadap perempuan berkaitan dengan mahar hanya merupakan salah satu masalah yang saat ini harus dihadapi kaum perempuan India. Sistem patriarki yang mengambil bentuk diskriminasi terhadap perempuan membuat sebagian besar kaum perempuan India harus tertatih-tatih mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan kaum perempuan di bagian lain dunia.

Berdasarkan catatan Kementerian Pembangunan Sumber Daya Manusia, Departemen Pendidikan Menengah dan Tinggi, India, angka melek huruf secara

nasional meningkat dari sebelumnya 52,21 persen pada tahun 1991 menjadi 65,38 persen pada tahun 2001. Meskipun demikian, tingkat melek huruf kaum perempuan India (54,16 persen) masih tertinggal di belakang lawan jenisnya (75,85 persen). Dengan perkiraan penduduk perempuan berjumlah 495,7 juta jiwa, ini berarti masih ada hampir 230 juta perempuan India yang tidak mempunyai akses kepada kebudayaan baca-tulis. Tingginya tingkat buta huruf di kalangan perempuan India yang membawa implikasi kepada rendahnya akses mereka kepada segala jenis pelayanan publik dan peluang untuk bertahan hidup.³

Rendahnya akses kepada pelayanan kesehatan, misalnya, mengakibatkan angka kematian perempuan yang cukup tinggi di India terutama bagi yang tinggal di pedesaan. Laporan yang dikeluarkan Indian Council for Medical Research (ICMR) mengungkapkan bahwa tingkat kematian perempuan desa usia 15-45 tahun mencapai 12,5 persen. Angka ini 50 kali lipat angka kematian perempuan di negeri-negeri maju. Begitu juga dengan tingkat kematian pasca kelahiran. Diskriminasi terhadap perempuan di India bahkan terjadi ketika bayi perempuan baru dilahirkan. Dari sensus tahun 2001 tampak bahwa rasio jenis kelamin perempuan dan laki-laki semakin menurun. Pada tahun 1981 terdapat 934 perempuan untuk setiap 1.000 laki-laki. Adapun pada tahun 2001 jumlah perempuan turun menjadi 927 untuk setiap 1.000 laki-laki. Banyak faktor ikut mempengaruhi terjadinya pembunuhan bayi perempuan ini, seperti rendahnya status perempuan, semakin menguatnya tradisi

³ *India Lantik Presiden Wanita*, Juli 2007 (diakses 22 Agustus 2007) dari <http://www.bbc.co.uk/indonesian/news>

mahar di seluruh tingkatan kasta, serta Revolusi Hijau dan peminggiran kaum perempuan di bidang pertanian.⁴

Gambaran di atas barangkali hanya menunjukkan sebagian sisi suram kondisi perempuan India. Terdapat jurang yang amat besar antara perempuan dan laki-laki. Akibat diskriminasi yang bersifat budaya dan ekonomi. India belumlah benar-benar merdeka apabila kaum perempuan mereka masih menjadi obyek kekerasan, baik di ranah publik maupun domestik, serta mengalami diskriminasi di segala bidang.

Ditengah kondisi perempuan India seperti digambarkan di atas, saat ini tepat tanggal 12 Juli 2007 India melantik seorang presiden perempuan untuk pertama kalinya bernama Pratibha Patil sejak 60 tahun kemerdekaannya pada tanggal 15 Agustus 1947. Pratibha Patil yang dicalonkan oleh Partai Kongres ini berhasil memenangkan pemilihan presiden India dan berhasil mengalahkan lawannya yaitu Wakil Presiden India Bhairon Singh Shekhawat (84), yang dicalonkan Partai Bharatiya Janata, partai Hindu nasionalis yang berposisi. Walaupun berdasarkan konstitusi India jabatan presiden hanya jabatan seremonial, namun terpilihnya Patil telah menjadi simbol kemenangan bagi ratusan juta kaum perempuan India yang seringkali dianggap sebagai warganegara nomor dua (second class) yang sering mengalami tindak diskriminasi.

⁴ Patil jadi Presiden Perempuan Pertama, Juli 2007 (diakses 22 Agustus, 2007) dari <http://www.kompas.com/kompas-cetak>

D. Pokok Permasalahan

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

“Mengapa Pratibha Patil terpilih sebagai Presiden perempuan pertama di India pada pemilu tahun 2007 ?

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk menjawab pertanyaan penulis sesuai dengan pertanyaan dalam perumusan masalah diatas maka, penulis menggunakan kerangka pemikiran dibawah ini sebagai pisau analisa bagi pertanyaan diatas baik berupa teori ataupun konsep.

Teori berfungsi bagi penulis untuk membantu menjelaskan tentang suatu fenomena atau masalah yang telah dan sedang terjadi, menyederhanakan masalah dan bahkan membantu menjelaskan tentang apa yang akan terjadi. Konsep merupakan abstraksi tentang suatu obyek atau sifat obyek yang berfungsi untuk mendeskripsikannya lewat kata atau kalimat, dan secara aktual dijelaskan melalui definisi.⁵ Untuk mengeksplanasikan permasalahan di atas penulis menggunakan konsep dan teori sebagai berikut :

1. Teori Feminisme

Feminisme merupakan konsep yang muncul dalam kaitannya dengan perubahan sosial, teori-teori pembangunan, kesadaran politik perempuan dan gerakan

⁵ Diperoleh penulis dari Nur Azizah, S.IP dalam mata kuliah Teori Hubungan Internasional,

pembebasan perempuan, termasuk pemikiran kembali institusi keluarga dalam konteks masyarakat modern.⁶ Dalam perkembangan selanjutnya kata tersebut digunakan untuk menunjuk suatu teori kesetaraan jenis kelamin (sexual equality) yang muncul pertama kali pada tahun 1895 yang kemudian dikenal secara luas.⁷

Pengertian feminisme akan mengalami perubahan sesuai dengan perbedaan realitas sosio-kultural, bahkan oleh situasi politik yang melatarbelakangi lahirnya gerakan tersebut. Disamping itu, feminisme akan mengalami perkembangan berdasarkan perbedaan tingkat kesadaran, persepsi serta tindakan yang dilakukan oleh para feminis itu sendiri.⁸

Menurut Kamlan Bashin dan Nighar Said Khan, feminisme secara terminologi didefinisikan sebagai: "suatu kesadaran atas adanya penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, ditempat kerja dan didalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut."⁹

Dapat disimpulkan bahwa inti gerakan feminisme adalah kesadaran terhadap adanya diskriminasi, ketidakadilan dan subordinasi perempuan, dilanjutkan dengan sebuah upaya untuk merubah keadaan tersebut menuju ke suatu sistem masyarakat yang lebih adil. Seorang feminis tidak harus berjenis kelamin perempuan, seorang laki-laki pun dapat menjadi seorang feminis, asal memiliki *concern* dan kesadaran

⁶Robeka G. Harsono, "Merancang Gerakan Generasi Muda Perempuan Era Posmodernisme" (Januari 5, 1994), 1.

⁷ Lisa Tuttle, *Encyclopedia of feminism*, (New York: Facts of File Publication, 1986), 107.

⁸ Kamlan Bashin dan Nighat Said Khan, *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya*, pent. S. Harlina, (Jakarta: Gramedia, 1995), 4.

⁹ Ibid., hlm.1

untuk mengubah ketidakadilan dan penindasan terhadap perempuan baik dalam keluarga maupun masyarakat. Dengan demikian perhatian utama dari gerakan feminisme adalah terciptanya suatu justice (keadilan), equality (kesetaraan) dalam sistem dan struktur masyarakat.

Oleh karena itulah, perjuangan Pratibha Patil dan Partai Kongres dapat kita lihat sebagai perjuangan terhadap pembebasan kaum perempuan. Terlepas dari berbagai jenis varian feminisme yang mereka gunakan sebagai metode pembebasannya. Untuk melihat hal ini, berikut akan dijelaskan beberapa jenis dari feminisme.

a. Feminisme Liberal

Feminisme liberal menyatakan bahwa kebebasan dan keadilan berakar pada rasionalitas dan “perempuan adalah makhluk yang rasional” juga. Karena setiap manusia punya kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional, begitu pula dengan perempuan. Perbedaan antara nilai tradisional dan modern adalah pusat letak masalah. Sehingga, anggapannya adalah keterbelakangan dan ketidakmampuan kaum perempuan bersaing dengan laki-laki adalah karena kelemahannya sendiri, yaitu akibat dari kebodohan dan sikap irrasional yang berpegang teguh pada nilai-nilai tradisional. Maka dari itu perempuan harus mempersiapkan diri agar mereka mampu bersaing dengan laki-laki dan punya kedudukan setara dengan laki-laki. Perempuan harus membekali diri dengan bekal pendidikan dan penguasaan. Inilah yang dikatakan

oleh salah seorang tokohnya, Naomi Wolf, sebagai “feminisme kekuatan” yang merupakan solusi.

Mary Wollstonecraft dalam bukunya *A Vindication of the Right of Women* (London, 1792) mengecam berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan, menuntut persamaan hak bagi perempuan baik dalam pendidikan maupun politik. Perempuan harus diperbolehkan bersekolah dan memberikan suaranya dalam pemilihan umum.¹⁰

Feminisme liberal bertujuan untuk menciptakan struktur ekonomi dan politik yang adil dan menuntut adanya kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam kancah politik. Pada aliran feminis liberal, yang diperjuangkan adalah persamaan pendidikan dan profesi serta hak-hak politik didalam undang-undang dan berparlemen (yuridis formal).¹¹

Dalam kasus Pratibha Patil, dia membekali dirinya dengan pendidikan Sarjana Seni dan Pendidikan dari MJ College di Jalgaon dan Sarjana Hukum dari College Hukum di Mumbai sampai akhirnya menjadi pengacara setelah berlatar belakang pendidikan S-2. Padahal Pratibha dilahirkan dari keluarga yang relatif sederhana dan sama sekali tidak memiliki latar belakang politik

Kepedulianya pada bidang sosial pun terlihat ketika Pratibha menjabat sebagai Gubernur Rajasthan, dimana Pratibha berusaha mengembangkan seluruh

¹⁰ Syamsudin Arif, “Menyikapi Feminisme dan Isu Gender”, (diakses 25 Oktober 2007) dalam www.hidayatullah.com

¹¹ Monevur Ekik, *Bentuknya Teori Pembangunan dan Globalisasi* (Yogyakarta:Insist

sektor di wilayahnya terutama peran perempuan dan kasta terpinggirkan. Dia membangun beberapa sekolah di Jalgaon dan Mumbai yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin.¹² Begitu prihatinnya kepada kaum miskin, terutama perempuan, Pratibha pernah mendirikan bank untuk membantu perempuan miskin di Rajasthan.¹³ Berbagai upaya Pratibha jelas terlihat untuk perbaikan kaum perempuan India.

Pratibha menggunakan jalur politik untuk pertama kali pada tahun 1962, ketika usianya masih 27 tahun. Pratibha mengasah dirinya untuk menjadi seorang politikus ulung sampai akhirnya beberapa kursi menteri pun diraihnya. Pratibha juga berhasil menjadi Gubernur perempuan pertama di Negara bagian Rajasthan.

b. Feminisme Sosialis

Perjuangan feminisme sosialis tidak bisa dilepaskan dari perjuangan sosialisme. Tidak ada revolusi yang berhasil tanpa disertai pembebasan kaum perempuan. Analisis feminisme sosialis adalah gabungan feminisme radikal yang menggunakan analisis patriarki dan feminisme marxis yang menggunakan analisis struktur kelas.

Bagi feminisme sosialis, ketidakadilan terhadap perempuan muncul karena pertama, berpijak pada analisis Engels bahwa melalui proses sejarah, kaum perempuan berubah dari anggota masyarakat yang bebas dan *equal* menjadi subordinate. Adanya kepemilikan pribadi dan munculnya kelas, dengan keluarga sebagai lembaga yang melanggengkannya. Friedrich Engels yang menjelaskan dalam

¹² "Pratibha Patil Kandidat Presiden Wanita Pertama India: di Bawah Dukungan Penuh Sonia Gandhi," *Seputar Indonesia*, 2 Juli 2007, 1

¹³ Dieter D. Caro, "Pratibha Patil, demi Perempuan India," *Kompas*, 22 Juli 2007, 16

buku *The Origin of the Family, Private Property and the State* (1884). Keterpurukan perempuan bukan karena perkembangan teknologi, bukan karena perempuan lemah secara mental dan tenaga, bukan karena sebab lain, tetapi karena munculnya kelas. ¹⁴

Kedua, adanya ideologi patriarki yang melestarikan secara sosial dominasi lelaki dan sebaliknya peminggiran peran dan kedudukan perempuan. Karena akar penindasan perempuan bersifat struktural baik itu sistem budaya patriarki maupun sistem kapitalisme maka dari itu cara penyelesaiannya pun harus bersifat struktural pula.

Tujuan dari feminisme sosialis adalah terciptanya suatu masyarakat dimana ideologi patriarkal secara logis tidak diperlukan, dimana perbudakan perempuan di dalam keluarga harus dihapuskan, perempuan terlibat dalam proses produksi secara bersama-sama dan memecahkan setiap permasalahan masyarakat secara bersama-sama pula.

Maka analisis feminisme sosialis selain menggunakan analisis patriarki, juga menggunakan analisis atas struktur kelas. Dimana terjadi pertentangan kelas antara kelas tertindas dan kelas penindas. Zillah Eisenstein salah satu pemikir feminis sosialis dalam teorinya *capitalist patriarchy*, membuat analog tesis 'kaum perempuan sebagai suatu kelas' dengan menguraikan apa yang oleh Marx disebut masalah 'alienasi' yang dapat diterapkan pada kaum perempuan. Seperti pandangan Marx,

¹⁴ Mansour Fakih, *Bentuknya Teori Pembangunan dan Globalisasi (Neoliberalisist*

sosialisme tidak harus menghancurkan privilege kelas, tetapi perbedaan kelas itu sendiri yang harus dihancurkan.

Karena Pratibha berasal dari partai Kongres dan menggunakan partai Kongres sebagai alat perjuangannya maka kita juga harus melihat seperti apa sistem dan struktur di dalam tubuh partai Kongres itu sehingga mampu mendukung perjuangannya.

Kehadiran partai Kongres yang telah menjadi legenda di India tidak bisa lepas dari dinasti Gandhi-Nehru yang telah mendominasi negeri dengan penduduk sekitar 1,12 miliar jiwa. Berbicara tentang partai Kongres berarti berbicara tentang sejarah keluarga ini. Karena penindasan perempuan juga terjadi didataran keluarga dimana keluarga juga ikut berperan dalam meminggirkan peran perempuan dan ikut melanggengkannya maka perubahan atau pembebasan kaum perempuan juga perlu dimulai dari tingkat ini.

Partai Kongres oleh para pendirinya sejak awal sudah ditanamkan nilai-nilai perjuangan pembebasan perempuan. Di dalam keluarga, budaya patriarki mulai dikikis secara perlahan, tidak ada dominasi lelaki terhadap perempuan, tidak ada perbedaan status antara lelaki dan perempuan, dan adanya kesempatan yang sama diberikan kepada lelaki dan perempuan untuk memperoleh pendidikan dan berkarir.

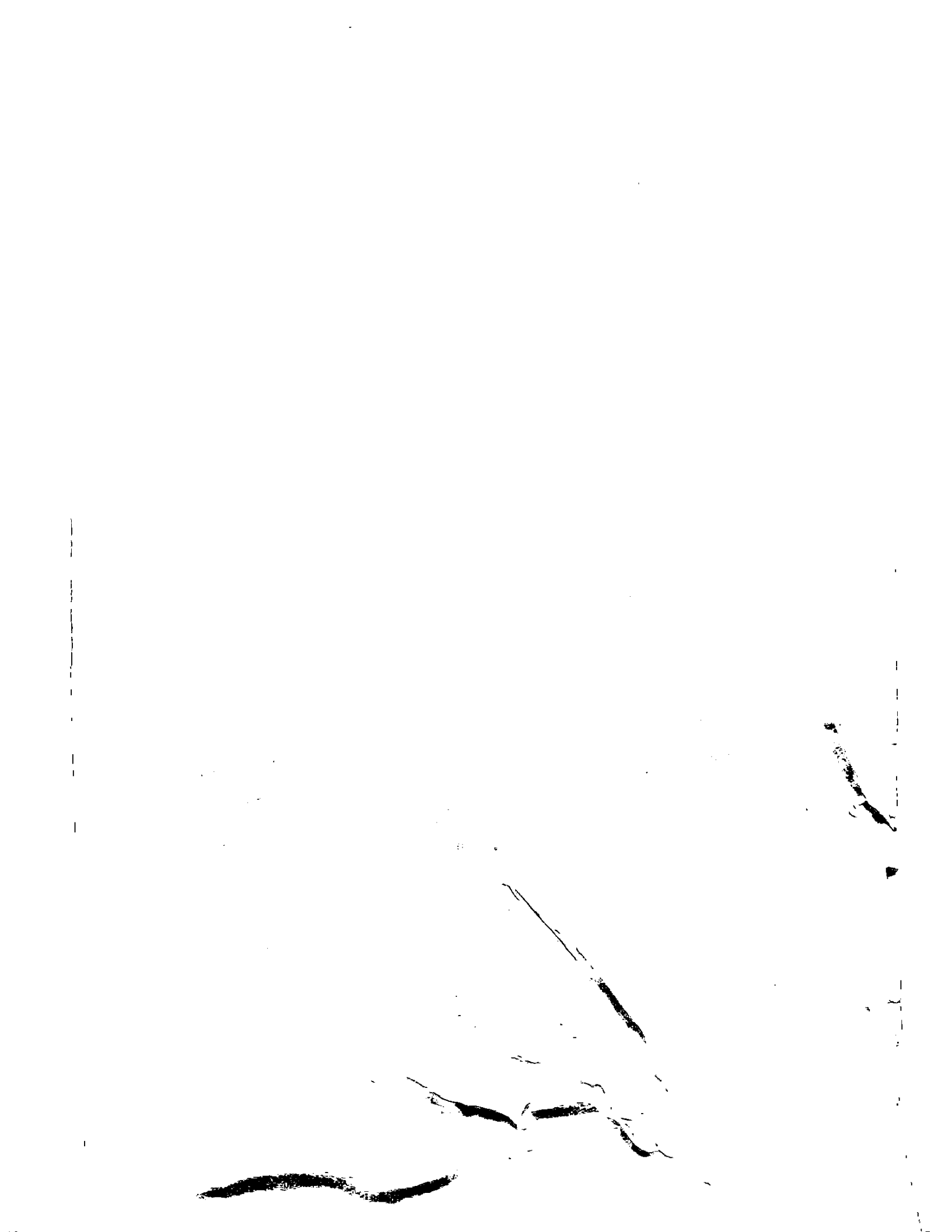
Mahatma Gandhi seorang pecinta kemanusiaan sejati yang sangat gigih menentang ketidakadilan dalam bentuk apapun. Sejak awal Gandhi selalu mendukung perjuangan untuk mengatasi persoalan perempuan. Dan dia selalu memulai

pembaharuan dari dalam rumahnya sendiri termasuk kepada isteri dan perempuan-perempuan dalam lembaga-lembaga yang beliau pimpin. Seperti beberapa cuplikan kalimat dari tulisan-tulisan Gandhi atas nama kepentingan kaum perempuan “ saya tidak akan pernah berkompromi dalam hal hak-hak perempuan. Saya harus memperlakukan anak laki-laki dan perempuan dengan berpijak pada kesetaraan yang sempurna.”¹⁵

Jawaharlal Nehru yang belajar di bawah bimbingan Mahatma Gandhi, telah menjadi seorang pemimpin berkarisma dan radikal yang mendukung kemerdekaan India. Jawaharlal Nehru sebagai pendiri partai kongres telah mewarisi sifat dan nilai yang ditanamkan oleh Gandhi. Selama kepemimpinannya baik itu sebagai pemimpin partai maupun sebagai perdana menteri selalu berpijak pada kesetaraan laki-laki dan perempuan. Selama kepemimpinannya sebagai perdana menteri. Konstitusi india telah menjamin adanya kesempatan bagi kaum perempuan untuk berkecimpung dalam dunia politik. Sejak awal kemerdekaan India pada tahun 1947 Pemerintah sudah mendeklarasikan Undang-undang dasar yang berkaitan dengan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, membentuk berbagai badan administrasi yang membuka kesempatan kepada perempuan, dan memasukkan beberapa feminis untuk duduk di dalam pemerintahan.¹⁶

¹⁵ Mahatma Gandhi, *Kaum Perempuan dan Ketidakadilan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), ix

¹⁶ *Dari Chipko ke Sati: Gerakan Perempuan India Kontemporer* (diakses 20 Januari 2008) dari <http://www.kalyanainitra.or.id/kalyanamedia/1/3/wacana.htm>



Tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan juga dilihat oleh Nehru selepas kepemimpinannya. Partai Kongres pun digantikan oleh anak perempuan beliau yaitu Indira yang seorang perempuan. Begitu juga cucu-cucu beliau Rajiv dan Sanjay serta menantunya Sonia Gandhi. Nilai-nilai ini pun ternyata tidak berhenti pada sekedar tertanam didalam diri keluarga Nehru-Gandhi. Namun dalam perkembangannya, nilai-nilai tersebut juga di aplikasikan ke dalam tubuh partai Kongres.

Sebagai bukti yang dapat menjelaskan bahwa partai Kongres selepas kepemimpinan para pendahulunya, tetap konsisten dan berpegang teguh pada keberpihakannya pada kaum yang termarginalkan yaitu perempuan adalah segala tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan partai Kongres yang dapat membantu perjuangan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

Peran partai Kongres dalam upaya memperbaiki nasib kaum perempuan dilakukan dengan berbagai cara. Termasuk merespon setiap adanya isu global tentang perempuan yang sedang berkembang baik itu konferensi perempuan internasional maupun konvensi-konvensi PBB. Selain itu kampanye besar-besaran untuk menarik perhatian masyarakat internasional pun kerap dilakukan.

Dunia internasional sudah mengakui adanya kesetaraan laki-laki dan perempuan yang diatur oleh hukum internasional. Partisipasi sebuah Negara dalam merespon setiap isu dan peristiwa internasional tentang perempuan yang terjadi adalah bukti kepedulian dan keberpihakannya pada perubahan nasib perempuan.

Beberapa peristiwa internasional seperti Convention on the Political Right of Women tahun 1957, Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW) tahun 1979, CEDAW COMMITTEE tahun 1982, Declaration on the Elimination of Violence Against Women tahun 1993, Commission on the Status of Women, Beijing Conference tahun 1995 menjadi acuan partai Kongres dalam setiap tindakannya dan dapat menjadi bukti bahwa partai Kongres tanggap dalam merespon isu-isu internasional terutama tentang perempuan.

1. Atas prakarsa dari Rajiv Gandhi sebagai Perdana Menteri India, pada bulan Desember tahun 1992 parlemen mengesahkan Amandemen nomor 73 dan 74 yang intinya memberikan jatah kursi 33 persen di lembaga Panchayat bagi perempuan
2. Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) adalah suatu instrument standar internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 1981. Pada tanggal 18 Maret 2005, 180 negara, lebih dari Sembilan puluh persen negara-negara anggota PBB, merupakan Negara peserta konvensi, termasuk salah satunya adalah India.
3. Komite penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW Committee) dibentuk tahun 1982 setelah konvensi dinyatakan berlaku. Tugas utamanya untuk mempertimbangkan laporan periodik dari Negara-negara peserta mengenai langkah dan tindakan yang telah

dilaksanakan sesuai ketentuan konvensi. India sudah pernah memberikan laporannya kepada komite CEDAW pada persidangan CEDAW ke 37 pada tanggal 15 Januari – 2 Februari 2007 di New York USA.

4. Pada tingkat internasional, kekerasan terhadap perempuan telah dilihat sebagai suatu bingkai kejahatan terhadap hak dan kebebasan dasar perempuan. Masyarakat internasional telah menciptakan standar hukum yang efektif dan khusus memberikan perhatian terhadap KDRT. Di India undang-undang penghapusan kekerasan terhadap perempuan pun sudah ditetapkan pada tahun 2005 yaitu dalam *the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005*
5. Pemerintah Pusat India juga telah menetapkan undang-undang Komisi Perempuan Nasional pada tanggal 30 Agustus 1990. Dan membentuk The National Commission for Women pada tahun 1992.
6. Pada konferensi dunia keempat tentang perempuan di Beijing tahun 1995, India adalah Negara pertama yang menyatakan akan mengadopsi sepenuhnya naskah platform of action. Negara India menyatakan komitmennya untuk menjamin partisipasi wanita yang penuh dan sederajat dalam politik, sipil, sosial, dan ekonomi.¹⁷

¹⁷ Eko Darwanto "Meningkatkan partisipasi politik wanita melalui konstitusional dan pemilu," (Jakarta: Internasional IDEA, 2002), 49

2. KONSEP GENDER

Manusia secara kodrati dapat dibedakan antara laki-laki dan perempuan, perbedaan kodrati inilah yang disebut jenis kelamin yang mengacu pada fungsi biologis. Derivasi dari aspek kodrati yang dimiliki kedua jenis kelamin tersebut adalah lahirnya konsep gender yang lebih merupakan hasil konstruksi social.

Dalam Encyclopedia Britanica disebutkan arti gender sebagai berikut :

An individual's self conception as being male or female, as distinguished from actual biological sex. Gender identity is not fixed at birth : both phsycologic and social factor contribute to the early establishment of core identity, which modified and expanded by social factor as a child matures.¹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis kelaminlah yang membedakan antara laki-laki dan perempuan berdasar unsur biologis yang dimiliki, sedangkan gender dimaksudkan sebagai pembedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosio kultural. Identitas gender baru muncul kemudian, setelah kelahiran manusia yang secara kodrati dilahirkan dengan jenis kelamin tertentu. Jadi gender tidak bersifat kodrati seperti halnya jenis kelamin. Namun karena kemunculan identitas gender mengikuti kelahiran manusia dengan jenis kelamin tertentu maka gender dianggap inheren dalam jenis kelamin bahkan menjadi identik dengan jenis kelamin.

perempuan diidentikkan dengan sosok yang lemah, halus dan emosional. Sementara laki-laki digambarkan sebagai sosok yang gagah, berani dan rasional.

Pandangan ini telah memposisikan perempuan sebagai makhluk yang seolah-olah harus dilindungi dan senantiasa bergantung pada kaum laki-laki. Akibatnya, jarang sekali perempuan untuk bisa tampil menjadi pemimpin, karena mereka tersisihkan oleh dominasi laki-laki.

Sementara kedudukan perempuan dalam masyarakat India, dalam Encyclopedia Britanica dinyatakan:

Di India, kepatuhan merupakan prinsip yang paling utama. Siang dan malam wanita harus dijaga dan tergantung kepada penjaganya. Peraturan hak waris merupakan bagian keturunan laki-laki, dimana hubungan darah melalui laki-laki dan mengabaikan perempuan.²

Dan saat ini perempuan mulai tampil di garis depan sebagai pemimpin termasuk presiden, yang selama ini justru dikuasai oleh kaum laki-laki. India telah melantik presiden barunya seorang perempuan Pratibha Patil setelah memenangkan pemilihan presiden tahun 2007.

² Wanita India Kuno, diakses 22 Oktober dari <http://www.mail-archive.com/assunnah@yahooogroups.com/msg19636.html>

Dari beberapa poin diatas saja, dapat kita lihat bahwa dukungan dari partai kongres sendiri sudah sangat jelas memberikan ruang kepada siapa saja, laki-laki dan perempuan. Selain karena adanya nilai-nilai dasar yang telah ditanamkan oleh para pendahulunya akan adanya kesetaraan, keadilan dan anti diskriminasi, dibuktikan juga dengan adanya isu-isu internasional tentang perempuan yang selalu direspon oleh partai kongres yang sebagian besar pemimpinnya berhasil menjadi Perdana Menteri India. Konteks internasional ternyata juga memiliki peran untuk mempengaruhi tindakan dan proses pembuatan kebijakan dalam negeri suatu Negara.

2. Konsep Pemilihan Umum

Mengenai pemilihan umum, Harris G. Warren mengemukakan pendapat bahwa 'Election are the occasions when citizens choose their officials and decide what they want the government to do. In making these decisions, citizens determine what rights they want to have and keep'.¹⁸

Pendapat Warren tersebut pada intinya menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apa yang mereka ingin pemerintah lakukan. Dan dalam membuat keputusan itu para warga negara menentukan apa yang sebenarnya mereka inginkan untuk dimiliki.

Secara sederhana dapat kita nyatakan bahwa pemilihan umum adalah suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam

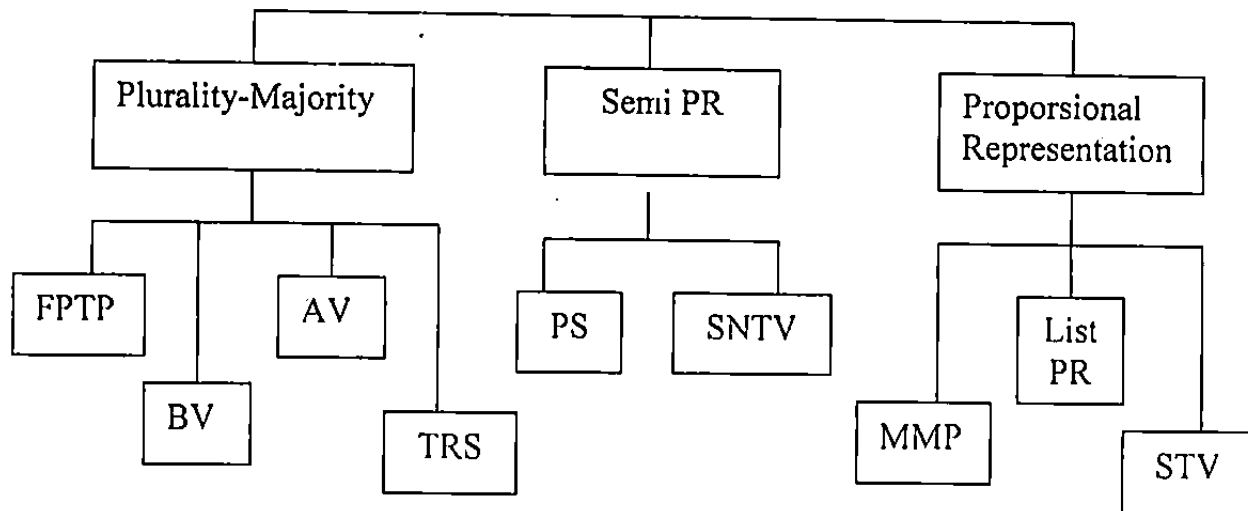
¹⁸ Haryanto, Partai Politik Suatu Tinjauan Umum, (Yogyakarta:Liberty, 1984) hlm.81

menjalankan roda pemerintahan, baik itu dalam legislatif maupun eksekutif dan untuk pemerintahan regional maupun lokal

A. Sudiharto Djiwandono mengemukakan pendapat bahwa pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang penting; ia merupakan sarana perwujudan nyata keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.¹⁹ Rakyat mempunyai hak untuk memilih dengan bebas wakil-wakilnya yang akan ikut menyelenggarakan kegiatan pemerintahan. Dengan melakukan pemilihan wakil-wakilnya secara bebas, secara tidak langsung rakyat sudah ikut terlibat dalam kehidupan kenegaraan.

Dalam menyelenggarakan pemilihan umum suatu negara menganut suatu cara atau prosedur yakni sistem pemilihan umum. Sistem pemilihan umum yang digunakan kemungkinan berbeda antara satu negara dengan negara lainnya tergantung situasi dan kondisi yang melingkupinya. Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan

Skema 1 Keluarga Sistem Pemilihan Umum



Keterangan :

FPTP→ First Past The Post ; **BV**→ Black Vote ; **AV**→ Alternative Vote ; **TRS**→ Two-Round System ; **PS**→ Parallel System ; **SNVT**→ Single Non-Transferable Vote ; **MMP**→Mixed Member Proportional ; **List PR**→List Proportional Representation ; **STV** → Single Transferable Vote

Sumber : International IDEA Handbooks of Electoral Design.

Dari skema diatas, dapat kita lihat jenis-jenis pemilihan umum yang dibagi dalam tiga kelompok besar, yaitu plurality-majority (sistem distrik), semi proportional, dan proportional representation.

a. Sistem Plurality-Majority

Untuk dapat terpilih dalam suatu daerah pemilihan, seorang kandidat atau beberapa orang kandidat harus memenangkan jumlah terbanyak dari suara yang ada (yang sah) atau dalam beberapa varian mayoritas dari suara sah dalam wilayah

pemilihan. Varian dari sistem ini meliputi First Past The Post, Block Vote, Alternative Vote, Two-Round System.

b. Proportional Representation (PR)

Sistem proportional representation atau populer disebut perwakilan berimbang adalah metode transfer suara pemilih ke kursi di parlemen sesuai proporsi perolehan suara pemilih. Sistem proposional hanya bisa diterapkan untuk pemilihan suatu badan atau lembaga yang jumlah anggotanya cukup banyak. Varian dari sistem PR meliputi List PR, Mixed Member Proportional, dan Single Transverable Vote.

c. Semi Proporsional

sistem semi proporsional merupakan formula yang mencoba menjembatani antara sistem distrik dengan proportional representative dengan cara mengakomodasikan kelebihan sistem PR dengan sistem distrik. Sistem ini pada dasarnya memberikan representasi bagi kelompok-kelompok minoritas dengan prinsip utamanya adalah adanya suara kumulatif, pembatasan suara, dan single nontransferable vote.

Keuntungan sistem ini adalah partai-partai kecil lebih mungkin atau mudah untuk terpilih. Berdasarkan pengalaman Jepang yang menggunakan sistem ini dari 1947-1993, salah satu kelemahannya adalah adanya tingkat proporsionalitas yang tidak sama antara distrik pedesaan dengan distrik perkotaan. Di distrik pedesaan

umumnya sangat tinggi tingkat proporsionalitasnya, sebaliknya di distrik perkotaan umumnya rendah tingkat proporsionalitasnya.

F. Hipotesa

Hipotesa adalah preposisi yang memiliki dukungan teoritis tetapi tidak didukung oleh fakta empiris. Hipotesa yang ada hanya merupakan kesimpulan sementara yang harus dibuktikan kebenarannya.²⁰

Berdasarkan pokok permasalahan dan kerangka pemikiran diatas, maka dapat ditarik beberapa hipotesa bahwa faktor-faktor yang mendukung kemenangan Pratibha Patil pada pemilihan presiden di India tahun 2007 adalah

1. Pratibha Patil telah membekali dirinya dengan pendidikan dan merintis perjuangan karirnya dalam politik sejak 1962 sehingga pengalaman dan kemampuannya memimpin sudah terasah.
2. Sistem dan struktur partai Kongres memberikan kesempatan dan hak kepada perempuan untuk menjadi pemimpin, terbukti dari tindakan dan kebijakan sebagai respon terhadap isu internasional tentang perempuan yang juga sejalan dengan perjuangan gerakan perempuan yang ada di India.

G. Jangkauan Penulisan

Jangkauan penelitian skripsi akan dibatasi mengenai faktor-faktor yang pendukung kemenangan Pratibha Patil pada pilpres India 2007 mulai dari penetapan Pratibha Patil sebagai calon presiden tanggal 14 Juni 2007 sampai pelantikan Pratibha

²⁰ Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta:

Patil sebagai presiden India tanggal 24 Juli 2007, dengan tidak menutup kemungkinan menyertakan peristiwa-peristiwa sebelumnya serta perkembangan politik di India.

H. Metodologi Penulisan

Teknik dalam mengumpulkan data didasarkan pada metode kualitatif sehingga data yang kami peroleh merupakan data sekunder. Data-data tersebut berasal dari buku, jurnal, surat kabar, situs-situs internet dan beberapa informasi yang mendukung penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

BAB I Merupakan proposal atau usulan untuk mengadakan penelitian, Adapun Bab ini berisi Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Teori, Hipotesa, Jangkauan Penulisan, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan.

BAB II Membahas dinamika keterlibatan perempuan dalam politik. sebelumnya akan dibahas terlebih dahulu kondisi umum perempuan India di dalam sosial budaya dan ekonomi.

BAB III Membahas tentang Kemenangan Pratibha Patil dalam pemilihan presiden India tahun 2007. Bab ini meliputi sistem pemilihan presiden yang ada di India seperti mekanisme dan partai politik serta pembahasan mengenai pemilihan presiden India pada tahun 2007.

BAB IV Faktor-faktor kemenangan Pratibha Patil yang mencakup faktor internal yaitu personal Pratibha Patil dan faktor eksternal yang ikut mendukung seperti struktur dalam partai kongres yang memberikan kesempatan kepada Pratibha Patil, berbagai isu global tentang perempuan dan gerakan perempuan di India.

DAN MENDUKUNG